BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di daratan maupun lautan sangat potensi untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi Indonesia. Seperti halnya yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Potensi kekayaan sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah guna kepentingan masyarakat agar tercapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan dari pembangunan negara Indonesia. Indonesia yang kaya akan hasil pertambangan yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada. Pertambangan sendiri adalah usaha untuk melakukan penggalian terhadap sejumlah potensi yang terkandung di perut bumi yang mencakup dari besi, emas, batu bara, timah, uranium, serta yang lainnya.¹ Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 2020 terkait perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau

¹ Salim HS,(2014) *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.”

Berlandaskan dari jenis materialnya, pertambangan di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan . Pertama, Golongan A, mencakup atas mineral yang strategis misal batu bara, minyak bumi, gas alam, uranium, aspal, dan bahan radioaktif yang lain misal nikel. Kedua, Golongan B mencakup atas beberapa mineral vital diantaranya emas, intan, besi, perak, tembaga, bauksit, serta seng. Ketiga, Golongan C ialah mineral yang dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan kedua golongan pertambangan yang lain, mencakup beragam pasir serta batu- batuan yang lain.

Salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi pertambangan adalah Kabupaten Situbondo. Kawasan Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.638,50 Km² yang terdiri dari 17 kecamatan. Potensi pertambangan bahan galian yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo yaitu bahan tambang galian C terkhususnya galian kapur yang terletak pada Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Perkembangan kegiatan tambang saat ini sangatlah pesat. Hasil pertambangan disini memiliki potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal dan agar dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama bagi penambang. Pengelolaan akan pertambangan yang baik disini harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan sekitarnya yang

mencakup kegiatan penambangan maupun kegiatan pascatambang. Namun sebaliknya sering kita jumpai akan maraknya penambangan liar dimana hal ini hanya untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan dampak negatif dari kegiatan tersebut.

Penambangan liar menjadi permasalahan yang serius dikarenakan jika dibiarkan maka tentu saja akan merusak ekosistem lingkungan hidup yang ada. Hal ini bisa terjadi dikarenakan aktivitas tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin, standar operasional dan kurangnya akan pengawasan dari pihak pemerintah yang ada. Kabupaten Situbondo khususnya yang berada di desa Kotakan ini banyak ditemukannya kubangan air ataupun bekas kerukan yang ditinggal begitu saja oleh segelintir penambang tanpa danya usaha reklamasi, tentu hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar tambang jika beraktivitas di wilayah sekitar tambang. Hal ini menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia, Menurut Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Momon Suwito Pratomo menyatakan bahwa dari informasi yang ada, pengendara tersebut meninggal dikarenakan jatuh ke jurang disinyalir korban tidak bisa mengendalikan kendaraanya pada saat kondisi hujan dan terbatasnya penglihatan.²

Dari kasus kejadian tersebut tentu saja pelaku kegiatan tambang bisa saja dibebankan hukuman atas perbuatannya. Di Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang juga terdapat pada aspek norma hukumnya telah menetapkan adanya

² Antara , Polres Situbondo Selidiki Pengendara yang Meninggal di Jurang Galian C, <https://www.antaraneews.com/berita/3751857/polres-situbondo-selidiki-pengendara-yang-meninggal-di-jurang-galian-c> , diakses pada tanggal 1 oktober 2023

sanksi terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan. Dan didalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan ada 3 sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku diantaranya ,sanksi hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi hukum administrasi.³ Ketiga bentuk sanksi hukum itu dalam perkembangan hukum sekarang ini, hampir mewarnai semua sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk didalamnya Undang- undang tentang pertambangan yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun hanya saja penerapan di lapangan jenis sanksi-sanksi yang telah ada tersebut terkesan sulit untuk dilaksanakan yang terutama untuk kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal.

Hal ini diperparah dengann adanya kesaksian dari masyarakat mengenai pengelolaan wilayah tambang yang disinyalir sering berpindah tangan, wilayah tambang yang sangat membahayakan dikarenakan tidak adanya rambu-rambu apapun, para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ketentuan penambangan.⁴ Pada pengamatan di lapangan, penegakan hukum akan pertambangan tanpa izin terkhusus untuk pertambangan kapur di Kabupaten Situbondo masih belum maksimal.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan dari suatu penegakan hukum

³ Igun Nahan, (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Setelah Ada Usaha Pertambangan Tanpa izin*. WASAKA HUKUM. Hal 29

⁴ RadarBanyuwangi, https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/753095173/pengelola-tambang-di-dekat-eks-lokalisasi-gunung-sampan-situbondo-sering-berpindah-tangan#google_vignette . diakses 20 Oktober 2023

tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum.⁵ Kurang adanya perhatian yang serius dari para aparat penegak hukum dan pemerintah setempat terhadap persebaran kegiatan penambang yang nakal ini.

Walaupun sudah tertera jelas pada Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batu bara telah mengatur secara jelas bahwasannya usaha pertambangan mengatur akan pemegang kuasa pertambangan ataupun izin mengenai kegiatan pertambangan. Tetapi masih banyak aktifitas tambang tanpa mempunyai izin atau kuasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan penambang rakyat.

Menurut Edy Sumantry, mengenai pertambangan tanpa izin (PETI), ialah “Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tentu saja kegiatan ini menimbulkan kerugian yang sangat amat terasa mengenai ekosistem alam yang rusak seperti halnya lubang-lubang bekas tambang yang ditinggal begitu saja.

Dibuatnya peraturan gubernur Jatim No. 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur ini tentu harapannya akan menjadikan para pengusaha tambang agar mempermudah dalam mengetahui mengenai mekanisme ataupun pedoman

⁵ Lawrence M Friedman, (2001), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar, terjemahan Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8*

akan memperoleh izin berdirinya sebuah tambang. Namun terbitnya peraturan tersebut mengandung kealpaan dimana tidak termuatnya aspek-aspek mengenai instrument lingkungan tentu hal ini menjadikannya akan berbahaya terhadap lingkungan dikarenakan tentu pihak penambang tidak dibebankan terhadap lingkungan yang terdampak. Dan berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NO.49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Apa implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan gubernur Jatim No. 49 Tahun 2016 sebagai Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui perspektif lingkungan terhadap Pergub. Jatim No.49 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur pada pertambangan kapur di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pemerintahan daerah yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut pengawasan terhadap aspek lingkungan serta mengenai izin praktik pertambangan.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat luar sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hukum pemerintahan daerah khususnya mengenai izin pertambangan dan aspek lingkungan akan berdirinya sebuah tambang kapur.
3. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk

mewujudkan kebenaran.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- 1) Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.⁷ Yaitu pada Undang-Undang No.32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009
- 2) Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang mengarah kepada doktrin-doktrin dan persepsi-persepsi yang tumbuh kembang pada ilmu hukum, guna menciptakan ide-ide sehingga terlahirlah definisi hukum, asas-asas hukum, serta konsep hokum.⁸ Pada penelitian ini penulis mengambil konsep lingkungan hidup sebagai acuan.

⁶ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.24

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁸ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁹ Penelitian ini dilakukan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis ambil.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data tangan kedua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

⁹ *Ibid.* hlm. 47

¹⁰ Saifudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91

- b) Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
 - c) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - g) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.
 - h) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang pengolahan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - i) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165

buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹³
- 4) Bahan Non Hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dapat dicontohkan seperti melakukan observasi ke objek yang peneliti tulis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta bahan non hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan

¹³ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian hukum normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54

permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.¹⁴ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hokum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Lok. Cit*, hlm. 171